Cakrawala
JURNAL LITBANG KEBIJAKAN

Volume 16 Nomor 2 Desember 2022
ISSN (Cetak): 1978-0354
ISSN (Online): 2622-013X
DOI: http://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i2.382

Evaluasi Peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Penanggulangan Bencana Alam

Evaluation of the Role of Disaster Significant Cadets (TAGANA) in Natural Disaster Management

✉**Irtanto**
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Indonesia

ARTICLE INFO

Peran Tagana,
Kemitraan,
Bencana

Article History:

Received : 7 Sept 2021

Accepted : 20 Maret 2022

Publish : 24 Des 2022

ABSTRAK:

Tujuan penelitian untuk melihat peran tagana dan melihat faktor pendorong dan penghambat, dampak sosialisasi terhadap masyarakat serta kemitraan dalam menjalankan peran. Pendekatan kualitatif deskriptif bahwatagana berperan aktif membantu dalam menangani bencana. Faktor modal sosial berupa motivasi mendorong keterlibatan dalam penanganan bencana. Posisi Tagana kurang kuat lepas dari organisasi pemerintah daerah dan tidak ada dukungan regulasi daerah. Pendanaan sangat tergantung pada APBN dan sangat sedikit, sumberdaya manusia terbatas, minimnya sarana dan prasarana. Sosialisasi dan pelatihan berdampak positif terhadap perubahan sikap, peduli, meningkatnya pengetahuan dan keterampilam dalam menangani bencana. Kemitraan Tagana berfungsi membantu penanganan bencana berjalan efektif, tetapi kemitraan sejajar dengan lembaga lain belum efektif.

ABSTRACT:

The aim of the research is to see the role of Tagana and to see the driving and inhibiting factors, the impact of socialization on the community and partnerships in carrying out the role. Descriptive qualitative approach that Tagana plays an active role in assisting in dealing with disasters. The social capital factor in the form of motivation encourages involvement in disaster management. Tagana's position was not strong apart from local government organizations and there was no local regulatory support. Funding is very dependent on the state budget and very little, limited human resources, minimal facilities and infrastructure. Outreach and training have a positive impact on changing attitudes, caring, increasing knowledge and skills in dealing with disasters. The Tagana Partnership functions to help disaster management run effectively, but parallel partnerships with other institutions have not been effective.

How to Cite:
Irtanto. (2022). Evaluasi Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 16*(2), 105-123. http://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i2.382.

✉Corresponding author :
Address : Jl. Gayung Kebonsari No. 56, Surabaya
Email : irtanto@rocketmail.com

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia, merupakan negara kepulauan dan Indonesia termasuk dalam wilayah *pasific ring of fire* (deretan gunung berapi pasifik), dan dipengaruhi oleh 3 gerakan, yaitu gerakan Sistem Sunda di bagian barat, Gerakan Sistem Pinggiran Asia Timur dan gerakan Sirkum Australia. Kedua faktor tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapa dan gempa bumi. Posisi geografis Indonesia yang strategis dan ditunjang dengan kekayaan alamnya di satu sisi memang sangat menguntungkan secara ekonomi, akan tetapi di pihak lain dapat menjadi ancaman karena berpotensi rawan bencana. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki potensi bencana alam, mulai dari bencana gempa bumi (tektonik dan vulkanik), gunung meletus, banjir, longsor hingga bencana sunami. Secara fisiografis wilayah Provinsi Jatim merupakan daerah pegunungan; kemudian daerah tengah yaitu gunung berapi dari daerah Ngawi, Blitar, Malang hingga Banyuwangi yang punya potensi bencana gunung meletus dan lainnya.

Dari sisi regulasi bahwa manajeman bencana secara makro di Indonesia sudah dijamin oleh UU No. 24 Tahun 2007 tentang penangulangan bencana yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam proses manajeman bencana. Namun dalam penerapannya seringkali kaku dan birokratis. Hal ini mengakibatkan daya tanggap pemerintah terhadap bencana kurang cepat. Ditambah lagi persoalan kendali utama manajemen bencana yang tidak jelas dan tumpang tindih, dapat menimbulkan *misleading* penanganan baik pada fase tanggap darurat maupun pada fase *recovery*. Di Indonesia banyak unit organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang menangani bencana, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun *voulunteer*, seperti Kementerian Sosial, SAR, BNPB, BPBD (Badan Penanggulanagn Bencana Daerah), Satkorlak Penanggulangan Bencana, LSM atau NGO. Namun koordinasi antar unit organisasi dikesankan sangat lemah, sehingga dalam penanganan bencana tidak maksimal.

Data bencana alam di Kabupaten Malang tahun 2019 terjadi banjir 9 kali, Gempa bumi 10 kali, tanah longsor 47 kali dan tahun 2020 terjadi tanah longsor 17 kali, banjir 2 kali, gempa bumi sebanyak 33 kali. Kemudian di Kabupaten Blitar berdasarkan data statitisk tahun 2018 bencana alam berupa banjir sebanyak 2 kejadian, tanah longsor 3, dan tahun 2019 banjir 3 kejadian, tanah longsor 13 kejidian (BPS Proinsi Jawa Timur 2020)

Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang yang merupakan lokus penelitian ini sering terjadi bencana alam yang frekuensinya cukup tinggi seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan kecelakaan air, banjir lahar dingin Gunung Kelud, gunung Meletus, gempa bumi, putus jalan akibat banjir dan lain-lain. Bencana tersebut memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah Tagana dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana. Namun banyak hal yang dapat menghambat dalam menjalankan perannya baik pada prabencana, massa bencana dan pasca bencana. Hambatan tersebut berupa keterbatasan anggaran pemerintah, ketergantungan pada pemerintah daerah dalam menjalankan program, tingkat pendidikan rata-rata rendah, ekonomi keluarga yang kurang menguntungkan, pekerjaan tidak menetap, insentif rendah, sarana dan prasarana yang kurang dan tidak didukung oleh program kerja yang hanya tergantung pada dinas sosial setempat.

Lokus penelitian di Kab. Malang dan Blitar bertujuan untuk 1) Mengetahui peran Tagana dalam penanggulangan bencana; 2) Mengetahui faktor pendorong dan

penghambat Tagana dalam menjalankan perannya dalam penanggulangan resiko bencana; 3) Mengetahui dampak sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat; 4) Mengetahui kemitraan yang dibangun oleh Tagana dalam menjalankan perannya dalam menghadapi bencana alam.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menurut Jenkins (1978) adalah "*The moment of determining the extent to which a program is yielding its objectives, using avaliable methods give evidence that is objectives. Systematics and comprehensive".* Dwijowijoto (2004) mendefinsikan evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui sejauhmana kesenjangan antara "harapan dan "kenyataan" dari suatu kebijakan publik. Lester & Stewart, 2000 (dalam Winarno, 2007) evaluasi kebijakan dititikberatkan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan. Palumbo (1987) melihat kebijakan 1) penilaian ketika kebijakan sedang dilaksanakan, termasuk analisis sejauhmana kebijakan telah dilaksanakan dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan; 2) Memonitor sutau kebijakan atau program dikelola sehingga dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan proses implementasi program; 3) Mempertanyakan: a) Sejauh mana pelaksanaan program telah sampai pada kelompok sasaran? b) Apakah pelaksanaan program telah konsisten dengan spesifikasi desain program? c) Sumber-sumber apa saja yang sedang dan telah dipakai/dikeluarkan untuk pelaksanaan program?. Sedangkan *summative evaluation* menurut Palumbo (1987) adalah 1) fase untuk menilai sejauhmana pelaksanaan kebijakan/program telah memberikan dampak nyata/aktual terhadap masalah yang hendak dipecahkan; 2) Cara yang dipakai adalah: a) Kuantitatif: *impact assessment, experiments/quasi-experiment, comparative mode*. b) Kualitatif: Sistem nilai, sistem kepercayaan, ideologi parpol dll.

Evaluasi kebijakan tentunya juga dilihat drai dimensi dampaknya, seperti David Nachmias evaluasi kebijakan adalah sebagai penilaian dampak kebijakan yang sedang dilaksanakan dan program publik terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan semula secara obyektif, sistematik, dan empirik. Impact kebijakan Howlett dan Ramesh (1995), merinci ada beberapa dimensi dampak (*impac*t) kebijakan, adalah sebagai berikut: 1) Dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan; 2) Adanya limbah kebijakan (positif/negatif); 3) Pengaruh dampak kebijakan pada kondisi sekarang dan yang akan datang.

Selanjutnya Kodoatie dan Sjarief (2006) bahwa pengelolaan bencana secara keseluruhan membutuhkan sumber daya yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang manajemen bencana (*disaster management*) yang menyeluruh dan terpadu sehingga mampu menyadarkan dan meningkatkan kepedulian semua pihak untuk mereduksi dampak/akibat bencana sehingga mereka harus:

a. Mengetahui dan mengenal beberapa jenis bencana;
b. Mengetahui penyebab bencana;
c. Mengetahui siklus pengelolaan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
d. Mengetahui tindakan-tindakan bencana (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan), mulai dari preventif, mitimigasi, kesiapan sebelum terjadi bencana (pra bencana), respon dan tindakan saat bencana serta pemulihan dan penelitian setelah bencana (pasca bencana).
e. Menjelaskan *action plan* dari masing-masing instansi, institusi atau badan.
f. Mengajak semua pihak untuk peduli dan berperan aktif dalam pengelolaan bencana.

Implementasi dari ke enam substansi yang dikemukan oleh Kodoatie dan Sjarie (2006) tersebut dapat dikelompokkan atau digolongkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Kesiapsiagaan masyarakat sebagai kondisi, yaitu: 1). Masyarakat mengetahui dan mengenal beberapa jenis bencana; 2). Mengetahui penyebab bencana; 3) mengetahui siklus pengelolaan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana; 4) mengetahui tindakan-tindakan bencana (pencegahan, penanggulangan dan pemulihan), mulai dari preventif, mitimigasi, kesiapan sebelum terjadi bencana (pra bencana), respon dan tindakan saat bencana serta pemulihan dan penelitian setelah bencana (pasca bencana).
b. Kesiapsiagaan masyarakat sebagai proses, yakni upaya yang dilakukan untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat mulai dari penjelasan *action plan* dari masing-msing instansi, institusi atau badan dari serangkaian kegiatan dalam penanggulangan bencana alam.
c. Kesiapsiagaan sebagai gerakan/ penyadaran (*campain*) agar semua pihak peduli dan berperan aktif dalam pengelolaan bencana.

Peran dan Kemitraan TAGANA

Tagana sebagai organisasi yang berbasiskan masyarakat mempunyai peran dan fungsi pada setiap tahap baik itu pada tahap pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Tagana mempunyai peran kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, peringatan dini, tanggap darurat, restorasi. Sedangkan fungsi Tagana adalah, fungsi percegahan, pengembangan atau pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan fungsi penunjang. Kemudian kemitraan yang merupakan hubungan timbal balik dan saling menguntungkan dari dua belah pihak yang bermitra yang dibangun berdasarkan kesamaan tujuan. Secara umum bahwa model kemitraan dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu: model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja (*networking*) atau *building linkages*. Levinger dan Jean Mulroy (dalam Notoadmojo, 2007), membedakan ada empat jenis kemitraan yaitu: 1) *Potential Partnership*. Pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain akan tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat. 2) *Nascent Partnership*. Pelaku kemitraan adalah partner kerja akan tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal 3) *Complementary Partnership*. Mitra mendapat keuntungan dan pertambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program *delivery* dan *resource mobilization*. 4) *Synergistic Partnership*. Tipe ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Kemitraan akan berjalan efisien dan efektif dan dapat berjalan secara berkelanjutan dipengaruhi fakto-faktor pendukung, antara lain: 1) Keterkaitan kegiatan. Adapun keterkaitan akan menimbulkan ketergantungan antar mitra satu dengan yang lain; 2) Kesetaraan posisi; 3) Kondisi lingkungan seperti kebijakan pemerintah; 4) Kebijakan pembinaan; 5) Ada tidaknya potensi konflik (http://lib.ui.ac.id/analisis).

Pendekatan yang digunakan menggunakan teori organiasi dalam melihat faktor pendorong maupun penghambat kinerja organisasi Tagana. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, ada faktor dominan maupun faktor yang tidak dominan. Mahmudi (2007:21) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lebih rinci dengan mengidentifikasi kedalam: 1. Faktor inidvidual, meliputi:

pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen; 2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader; 3. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim; 4. Faktor sistem, meliputi" sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi; 5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal".

Atmosoeprapto (2004), melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, dengan mengidentifikasi ke dalam faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah terdiri dari: a. Tujuan organisasi yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. b. Struktur organisai sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. c. Sumber daya manusia. d. Budaya organisasi yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi, adalah: a. Faktor politik. Faktor politik berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban. b. Faktor ekonomi. c. Orientasi nilai, yang berkembang di tengah masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

Kerangka Pikir Penelitian

Dari berbagai uraian tersebut di atas, maka disusunlah sebuah kerangka pikir penelitian dengan maksud untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian.

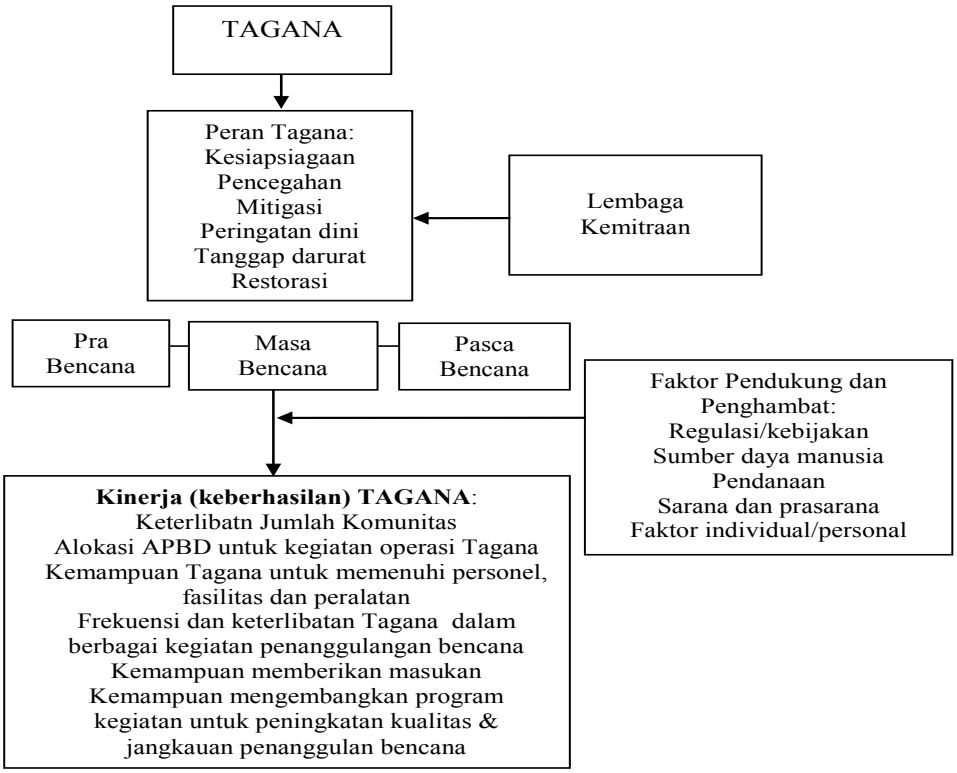

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif, yakni dengan cara mendeskriptifkan peran tagana yang didasarkan pada data kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah evaluasi, dengan tipe evaluasi partisipatif, dalam proses evaluasi tidak hanya melibatkan evaluator dan badan pelaksana pembangunan, tetapi target grup (Sutrisno, 1987). Lokus penelitian di dua Kabupaten, yaitu Malang dan Blitar, kedua Kabupaten tersebut merupakan daerah yang sangat berpotensi terjadinya bencana alam, baik itu gempa bumi, tanah longsor, bencana banjir, gunung meletus. Pengumpulan data yang dipergunakan adalah: 1. Diskusi kelompok (*Focus Group Discusion*) dengan para pengambil kebijakan, pelaksana program kegiatan, pengurus Tagana; 2. Wawancara, berdasarkan panduan kuesioner guna mendapat data secara langsung; 3. Dokumentasi, dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang ada di instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian danalisis secara kualitatif, dengan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:30-33) bahwa analisis merupakan tiga aliran kegiatan yang berjalan bersamaan: 1) Kondensasi Data (Data Condensation), 2) Penyajian Data (Data Display) dan 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Tagana dalam Prabencana

Tagana sebagai organisasi yang berbasiskan masyarakat mempunyai peran dan fungsi pada setiap tahap baik itu pada tahap pra bencana, terjadinya bencana dan pasca bencana atau mempunyai peran penting dalam siklus penanggulangan bencana alam. Tagana menurut Kementerian Sosial (2006), mempunyai peran kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, peringatan dini, tanggap darurat, restorasi. Sedangkan fungsi Tagana adalah, fungsi pencegahan, pengembangan atau pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan fungsi penunjang. Secara ringkas peran Tagana dalam penanganan bencana pada massa Prabencana dapat dilihat pada tabel 1 beriut ini.

Tagana Kabupaten Malang dan Blitar pada masa prabencana telah melakukan peran penting dalam penanganan bencana seperti Sosialisasi atau penyuluhan tentang kebencanaan di sekolah & perkumpulan masyarakat, pemberian pelatihan kepada masyarakat & KSB (Kampung Siaga Bencana), membantu atau memfasilitasi pembentukan KSB, *Goes to school* dan *go green*, melakukan pemetaan daerah terdampak bencana dan penentuan titik evakuasi. Namun Tagana dalam melakukan kegiatannya antara Tagana Kabupaten Malang dan Blitar frekuensinya berbeda, dan tidak mandiri dibawah koordinasi Dinas Sosial.

Peran Tagana Dalam Massa Bencana

Kemudian peran Tagana pada massa bencana, baik di Kabupaten Malang maupun Kabupaten Blitar secara ringkas dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tagana pada masa bencana terjadi mempunyai peran penitng walaupun berada di bawah koordinasi Dinas Sosial. Adapun kegiatan kemanusiaan yang dilakukan adalah melakukan pelayanan darurat kepada korban bencana, membantu melakukan tindakan (pendirian shelter, logistik, dapur umum), menggerakkan potensi dan sumber daya manusia (SDM Tagana, relawan, TSK dan lain-lain), melakukan evakuasi kepada para korban bencana, melakukan analisa resiko & kebutuhan dasar bersama dinas instansi terkait.

Tabel 1. Peran Tagana Masa Prabencana

No	Kab. Malang	Kab. Blitar	Keterangan
1	Sosialisasi/penyuluhan tentang kebencanaan di sekolah & perkumpulan masyarakat	Sosialisasi/penyuluhan tentang kebencanaan di sekolah & perkumpulan masyarakat	Sosialisasi yang dilakukan oleh Tagana sangat terbatas. Kab. Malang hanya 4 kali, Kab. Blitar 2 kali/tahun. Kegiatan menginduk pada dinas sosial, tidak mandiri
2	Pelatihan-pelatihan kepada masyarakat & KSB	Pelatihan-pelatihan kepada masyarakat & KSB	Pelatihan utk penguatan kapasitas tetapi yang dilakukan tidak rutin, tidak terprogram oleh Tagana. Sifat pelatihan koordinasi (seperti PMI, BPBD, SAR dll)
3	Membantu /memfasilitasi pembentukan KSB (kampung Siaga Bencana	Membantu/ memfasilitasi pembentukan KSB (kampung Siaga Bencana)	Di Blitar terbentuk 4 KSB dan di Kab. Malang 3 KSB
4	*Goes to school dan go green*	*Goes to school dan go green*	Pelatihan evakuasi kepada anak-anak sekolah
5	Pemetaan daerah terdampak bencana Penentuan titik evakuasi	Penyiapan & pemelihatraan peralatan /perlengkapan	-----

Sumber: Data Diolah

Peran Tagana dalam Masa Pasca Bencana

Demikian pula Tagana baik di Kabupaten Malang maupun Kabupaten Blitar telah berperan pada massa pasca bencana. Adapun peran tersebut adalah penguatan, pemenuhan dasar, pendampingan sosial masyarakat korban bencana dalam bentuk kegiatan trauma healing, rujukan kepada layanan dinas terkait, terlibat perbaikan (rehabilitasi) berkoordinasi dengan BPBD & dinas terkait.

Dampak Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi yang dilakukan oleh Tagana kepada masyarakat tentunya mempunyai *impact* baik negatip maupun positip. Dampak tersebut sangat tergantung dari intensitas sosialisasi atau pelatihan itu sendiri. Dari hasil pengumpulan data yang melalui wawancara kebanyakan menyatakan sosialisasi dan pelatihan yang dirasakan banyak manfaatnya berupa pengetahuan semakin bertambah. Kalangan masyarakat sebelum ada sosialisasi atau pelatihan tidak mengerti apa itu tindakan ataupun pencegahan berupa mitigasi seperti bagaimana cara menyelamatkan diri. Setelah ada sosialisasi ataupun pelatihan masyarakat daerah bencana semakin tahu harus kemana menyelamatkan diri atau menolong orang lain.

Dari hasil pelatihan atau simulasi maupun sosialisasi yang dilakukan oleh taruna siaga bencana (Tagana) dirasakan oleh banyak pihak utamanya daerah rawan bencana yang terutama daerah yang

memiliki KSB mempunyai dampak positif. Setelah sosialisasi, pelatihan maupun simulasi dirasakan banyak manfaatnya oleh masyarakat di sekitar daerah rawan bencana alam. Dengan adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh Tagana yang dikoordinasikan oleh instansi seperti Dinas Sosial, BPBD dengan pihak lain yang diselenggarakan di daerah rawan bencana dan di daerah yang ada KSB seperti di Desa Sukomulyo dan Desa Bendosari, Kecamatan Pujon merasakan banyak manfaatnya. Mereka mengerti dan bahkan masyarakat meminta untuk sering diadakan sosialisasi, pelatihan, simulasi. Selain itu masyarakat mempunyai keberanian untuk melaporkan jika menemui kerawanan bencana dan mau memantau daerah-daerah rawan bencana. Namun demikian mereka masih perlu banyak pelatihan, pendampingan, simulasi terutama sesuai dengan permintaan masyarakat wilayah KSB (Kampung Siaga Bencana). Demikian pula sosialisasi ataupun penyuluhan/ simulasi yang dilakukan oleh Tagana di Kabupaten Blitar terhadap masyarakat sekitar yang daerahnya rawan bencana berdampak positif terhadap meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.

Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh Tagana dari sisi kuantitasnya sangat sedikit, dan bila dilihat dari efektivtas pelaksanaannya tidak efektif karena tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat daerah rawan bencana. Namun bila dilihat dari dampak perubahan sikap, pemahaman, pengetahuan mempunyai dampak positif. Hal ini dapat dianalisis dengan beberapa teori atau pendapat para ahli. Sosialisasi maupun pelatihan memerlukan orientasi terhadap apa yang harus dilakukan. Menurut Mathis & Jackson (2002) bahwa "pelatihan adalah proses dimana individu-individu atau karyawan mencapai kemampuan tertentu guna membantu pencapaian tujuan organisasi". Dapat dikatakan bahwa impact sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan di daerah rawan bencana adanya perubahan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan sikap para peserta pelatihan.

Tabel 2. Peran Tagana Dalam Massa Bencana

No	Kab. Malang	Kab. Blitar	Keterangan
1	Pelayanan darurat kepada korban bencana	Melakukan analisa resiko & kebutuhan dasar bersama dinas instansi terkait	Keterlibatan Tagana Kb. Malang dalam bencana di 33 kecamatan, terutama bencana erupsi gunung kelud , bencana banjir bandang, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi dan putting beliung.
2	Membantu melakukan tindakan (pendirian shelter, logistik, dapur umum)	Melakukan tindakan (penyelenggaraan shelter, dapur umum, tim logistik, pendamping sosial/ psikososial)	
3	Menggerakkan potensi dan sumber daya manusia (SDM Tagana, relawan, TSK dan lain-lain).	Ikut mengerahkan potensi & SDM Tagana, sahabat Tagana, relawan organisasi pemerintah dan ormas.	Keterlibatan Tagana Kab. Blitar dalam bencana, erupsi gunung kelud tahun 2014, banjir, di Sutujayan terjadi setiap tahun, puting beliung, tanah longsor
4	Melakukan evakuasi kepada para korban bencana	Melakukan evakuasi kepada para korban bencana	

Sumber: Data Diolah

Tabel 3. Peran Tagana dalam Masa Pasca Bencana

No	Kabupaten Malang	Kab. Blitar	Keterangan
1	Penguatan masyarakat korban bencana dalam bentuk kegiatan Trauma healing, rujukan kepada layanan dinas terkait.	Pemenuhan dasar, pendampingan sosial termasuk trauma healing.	Tagana Kab. Malang dalam penguatan masyarakat terutama dalam bencana erupsi gunung kelud 2014, bencana puting beliung Langlang 2017, dan bencana lainnya
2	Terlibat perbaikan (rehabilitasi) berkoordinasi dengan. BPBD & dinas terkait	Rehabilitasi (perbaikan) bersama masyarakat dan dinas instansi terkait.	Tagana Kab. Blitar keterlibatannya terutama dalam bencana erupsi gunung kelud, banjir putting beliung dan tanah longsor.

Sumber: Data Diolah

Faktor Pendorong dan Penghambat:
Faktor Pendorong dan Penghambat Tagana dalam menjalankan perannya dapat dilihat pada lampiran 1.

SDM dan Organisasi
SDM Tagana Kabupaten Malang terdapat 100 orang anggota. Sedangkan Kabuapten Blitar mempunyai wilayah luas dan jenis kebencanaan bermacam-macan hanya mempunyai anggota Tagana hanya 43 orang. Sedangkan tingkat pendidikan mereka sangat variatif, dari tingkat, SMP, SMA/SMK. Dari usia mereka kebanyakan rata-arata usia muda, di bawah usia 50 tahun. Mereka yang duduk di struktur kepengurusan Tagana terutama Koordinatornya berasal pemerintahan, status pekerjaannya sebagai tenaga honorer di sekretariat Kabupaten Malang. Demikian pula Koordinator Tagana Kabupaten Blitar status pekerjaannya sebagai PNS yang bekerja di Dinas Sosial. Maksud dipilih dari PNS ini untuk mempermudah koordinasi. Demikian pula pengurus Tagana Kab. Malang latar belakang pekerjaan sehari-hari dalam kegiatan organisasi bermacam-macam, seperti pengakuan Koordinator wilayah Bantur, selain aktif di Tagana juga aktif sebagai TKSK, PKH, kelompok penyelamat pantai di pantai Balekampung Malang selatan, dan Ikut pengurus LSM pegiat anti korupsi.

Untuk pengembangan SDM Tagana mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang penanganan kebencanaan dari berbagai pihak misalnya dari BPBD, TNI, Badan SAR. Berbagai pelatihan yang dislenggarakan oleh BPBD Kabupaten Malang melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti Dinas Sosial, PMI, Pol Airud Polres Malang, TNI AL Lanal Malang. Pelatihan Team BRC (*Beach Rescue Cluster*) yang diselenggarakan di pantai Sendangbiru sebagai upaya untuk meningkatkan SDM Tagana, meningkatkan manajemen penyelematan pantai, pelaksanaan cepat, tepat dan terarah dalam penangganan masalah bencana di wilayah pantai.

Diselenggarakan BRC di pantai selatan ini dengan mempertimbangkan pesatnya pembangunan di wilayah selatan terutama pengembangan Jalur Lingkar Selatan (JLS) sejalan dengan pengembangan pariwisata yang akan memberikan dampak positif terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Namun komitmen Pemerintah daerah dalam pengembangan Tagana masih relatif kecil, baik dari segi jumlah anggota dan pelatihan

dasar masih mengandalkan dana dari APBN. Rata rata pengembangan anggota setiap daerah dibatasi 100 orang.

SDM Tagana Kabupaten Malang dikembangkan dengan cara memberikan pelatihan. Kegiatan pelatihan selain diikuti oleh Tagana juga diikuti oleh setiap personal Satlak PB (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana) dan para relawan. Pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM untuk penanganan bencana yang dilakukan di Kabupaten Malang dan Blitar sebagai berikut: 1) *Search and Rescue* (SAR); 2) *First Aid* (pertolongan pertama); 3). Survey, pengamatan, penilaian dan laporan; 4). Evakuasi; 5). Keselamatan Darurat (seperti pemebrian bantuan makanan); 6). Penanganan darurat; 7). Logsitik darurat; 8). Komunikasi daurat; 9). Staff pusat operasi darurat; 10). Manajemen informasi; 11). Manajemen pemulihan, rehabilitasi dan konstruksi; 12). Manajemen bencana berbasis masyarakat (MBBM) dan lain sebagainya.

Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadadap kinerja Tagana. Rata-rata sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas. Keterbatasan tersebut dapat dilihat di Tagana KabupatenMalang, namun dalam menggunakannya selalu memanfaatkan milik Satlak PB. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satlak PB Kabupaten Malang terdiri dari: a). LCR type AX 360 (perahu karet) dengan kapasitas penumpang 7 orang; b) Waterpomp apung "chub Fire (blanwir) 1 (satu) unit lengkap dengan pipa lentur 2' (2inci); c) Truk kelas III sebagai sarana angkutan material/peralatan. Sarana dan prasarana antara lain dipergunakan untuk menangani bencana vulkanik gunung kelud pada tahun 2007 di Kecamatan Ngantang. Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Tagana Kabupaten Malang masih terbatas terdiri dari sepeda motor tril sebanyak 2 buah, mobil ranger merek Mitsubhisi strada 1 (satu) buah, truk evakuasi 1 (satu) buah, Truk DU (dapur umum) 1 (satu) buah. Sarana dan parsana tersebut yang membelikan Kementerian Sosial RI. Sedangkan sarana yang dimiliki oleh Tagana Kabupaten Blitar pemberian kementerian sosial yang sifatnya melekat di Dinas Sosial berupa 1 buah mobil strada RTU (Rescue Tactical Unit), 1 buah truk dapur umum lapangan (Dumlap), 1 buah sepeda motor trail, beberapa tenda pengungsi, keluarga dan dapur umum, 1 buah perahu dolpin, perlengkapan dapur umum, alat komunikasi HT.

Bencana alam sering berimbas pada terputusnya jalur transportasi (akses penjangkauan pelayanan korban bencana alam). Banyak lokasi korban bencana yang sulit dan atau tidak dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat namun masih memungkinkan untuk dijangkau dengan kendaraan roda dua, seperti motor trail. Namun Tagana belum difasilitasi dengan kendaraan roda dua yang memadahi, jumlahnya sangat terbatas hanya satu buah saja. Kondisi ini sering berimbas pada keterlambatan dalam pendistribusian bantuan. Jalan keluarnya dengan menggunakan sepeda motonya sendiri-sendiri, bagi mereka yang tidak punya pastinya ikut temannya atau ikut dinas/instansi yang lainnya.

Tagana berpartisasipasi dalam penanggulangan bencana alam tentunya dibutuhkan posko sebagai pusat kegiatan. Pada umumnya posko kesiapsiagaan yang difasilitasi baru sampai di tingkat Kabupaten belum sampai pada kecamatan. Tagana telah mendapat tempat (ruang) yang dipergunakan sebagai Posko kegiatan, kalau yang dulu menempati salah satu ruangan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Malang, akan tetapi mulai tahun 2014 posko Tagana dipindah dengan

menempati Islamic Center Kepanjen Malang. Sedangkan Tagana Kabupaten Blitar menempati salah satu ruangan di Dinas Sosial.

Pendanaan & Insentif Tagana

Dalam Permensos No 29 tahun 2012 bahwa Tagana merupakan organisasi relawan yang berasal dari masyarakat, di bawah pembinaan Dinas Sosial. Pendanaan terhadap Tagana sangat tergantung pada anggaran pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota dan sumbangan masyarakat. Insentif yang diberikan kepada anggota Tagana dapat dikelompokkan dalam dua insentif. Pertama, insentif yang diberikan dalam kondisi normal (ketika tidak ada aktivitas dalam penanggulangan kegiatan). Pada awalnya, insentif yang diberikan sebesar Rp.50.000, tetapi mulai tahun anggaran 2009 telah bertambah menjadi Rp.100.000,. insentif tersebut diberikan perbulan kepada anggota yang terdaftar sebagai anggota aktif. *Kedua,* insentif yang diberikan kepada anggota Tagana selama mereka melakukan aktivitas penanggulangan bencana (dana pengerahan Tagana) berasal dari Pusat (Kementrian Sosial) adalah sebesar Rp.100.000, per orang/hari. Sedangkan dana yang berasal dari daerah ditentukan sesuai dengan kemampuan masing masing daerah.

Besarnya insentif yang diberikan oleh Pemerintah masih relatif sangat kecil dan tidak bisa untuk berbuat lebih banyak. Namun dukungan insentif tersebut dipahami oleh Tagana sebagai tali *asih.* Sejak 2014 taliasih ada penambahan, namun tidaklah terlalu besar, dari pusat sebesar Rp 100.000;/bulan dan pemberian dari Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 100.000;/bulan. Selanjutnya pada tahun 2017 taliasih mengalami kenaikan terutama pemberian dari pemerintah pusat. Kenaikan tersebut dari Rp 200.000;/bulan menjadi sebesar Rp 350.000"/bulan, dengan rincian sebesar Rp 250.000; pemberian dari pemerintah pusat dan Rp100.000; dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain dari taliasih tersebut jika ada kegiatan kebencanaan dimulai tahun 2015 hingga tahaun 2017 Tagana mendapatkan dana pengerahan dari Dinas Sosial Kabupaten sebesar Rp 30 juta pertahunnya dibagikan kepada mereka yang hadir/biasanya Rp 50 ribu/orang diberikan pertermin setiap 3 (tiga) bulan.

Taliasih yang diterima oleh Tagana Kabupaten Blitar sama dengan Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Pemberian Taliasih dari pemerintah pusat Rp 250.000;/bulan dan Rp 100.000;/bulan dari Pemerintah Provinsi Jatim. Insentif yang diberikan kepada Tagana kecil dibandingkan dengan beban kerja, sedangkan resiko yang harus ditanggung oleh Tagana dalam menangani bencana alam. Namun selama menjalankan tugas belum didukung dengan jaminan sosial yang memadai seperti tidak adanya asuransi kecelakaan/jiwa dalam menjalankan tugas kebencanaan.

Motivasi Individual

Motivasi individu untuk menjadi anggota Tagana sangat berpengaruh terhadap kelangsungan Tagana itu sendiri. Oleh karena itu motivasi anggotanya harus ditumbuhkan untuk menolong sesama dalam menangani bencana. Kerelaan mereka untuk berkorban menjadi dasar yang sangat penting. Taliasih yang diterima oleh Tagana sangatlah kecil, tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Bahkan mereka berangkat ke Yogya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi erupsi gunung merapi yang sangat dahsyat terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010 yang memakan korban jiwa dan harta yang tidak ternilainya jumlahnya.

Menjadi anggota Tagana lebih banyak bermotivasi menolong orang lain dalam menghadapi bencana alam. Mereka kebanyakan siap jika sewaktu-waktu

dibutuhkan, ada anggota Tagana karena tidak punya uang untuk berangkat ke lokasi bencana alam sampai menjual ayamnya sendiri. Hal ini terjadi di Ampelgading" (Diskusi, 8 Agustus 2017). Tagana untuk diberangkatkan membantu menangani bencana harus siap dengan tanpa pamrih, tidak semata-mata mencari keuntungan/ uang. Motivasi anggota Tagana untuk membantu memang kuat, hal ini dilihat atau dibandingkan dengan Taliasih yang diberikan sangat sedikit, masih tidak sebanding dengan resiko dan beban yang harus ditanggungnya.

Regulasi dan Komitmen Pemerintah

Regulasi untuk pengaturan organisasi Tagana seperti Permensos No 82/ HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana pada kenyataannya belum mengatur secara komprehensif, sehingga perlu disempurnakan. Kemudian Peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Permensos No 28 Tahun 2012 tentang pedoman umum Taruna Siaga Bencana yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permensos No. 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga. Demikian juga pembentukan KSB mempunyai legitimasi hukum yang kuat yaitu Permensoss 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Kampung Siaga Bencana selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan untuk program penanggulangan bencana.

Komitmen Pemerintah pusat terhadap keberadaan Tagana sudah cukup, yang Tagana dijadikan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam yang proses pembentukannya diinisiasi kementerian sosial. Secara administratif, Tagana difungsikan sebagai mitra kerja kementerian sosial dalam penjangkauan pelayanan sosial khususnya dalam penanggulangan bencana alam. Konsekuensi logis dari terbitnya SK menteri tersebut adalah lembaga kementerian soial harus memfasilitasi Tagana agar dapat melaksanakan kegiatannya.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Tagana, peran Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) masih bersifat sebagai fungsi penunjang. Dalam konteks ini, sebagian besar Program Pengembangan SDM Tagana, fasilitas dukungan yang diberikan untuk kesiapsiagaan Tagana, Insentif masih tergantung dari Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dan hanya saja pemerintah provinsi mempunyai inisiatif untuk menganggarkan berupa Tali asih sebesar Rp 100.000;/bulan untuk setiap anggota Tagana.

Komitmen pemerintah daerah berupa regulasi belum cukup kuat, dan tidak ada satupun regulasi daerah yang mengatur Tagana. Sebagai contoh komitmen pemerintah daerah dalam bentuk regulasi untuk anggaran untuk kelangsungan Tagana masih dirasakan kurang. Hal ini misalnya terlihat dari Peraturan Menteri sosial tersebut tidak mengatur tentang insentif yang harus diberikan kepada anggota Tagana, Dinas sosial atau intansi terkait untuk memberikan honorarium kepada anggota Tagana dalam menjalankan tugasnya untuk membantu menangani bencana alam tidak ada payung hukumnya. Di dalam Permensos No. 28 tahun 2012 disebutkan bahwa Tagana adalah relawan. Relawan secara hukum dapat diartikan sebagai tenaga yang tidak dibayar, secara sukarela membantu menangani bencana. Oleh karena itu Dinas sosial atau intansi yang lain tidak berani memberikan honor atau gaji kepada anggota Tagana yang secara aktif membantu untuk menangani bencana alam.

Faktor Program

Tagana sebagai basis kekuatan pelaksana kegiatan untuk menunjang tugas pemerintah baik pemerintah pusat dan

daerah. Sedangkan mobilisasi Tagana tidak hanya sebagai basis kekuatan untuk satu wilayah (kabupaten/Kota), tetapi dapat dimobilisasi untuk penanggulangan bencana di luar wilayahnya (baik itu dalam lingkup bencana regional maupun nasional). Kondisi ini tentunya bergantung dengan kebijakan lembaga yang memfasilitasinya seperti Dinas Sosial, BPBD. Di sisi lain, ketergantungan semacam ini dapat berdampak pada mobilitas Tagana sebagai organisasi yang terkesan statis. Karena ketergantungan ini sehingga Tagana tidak mempunyai program sendiri yang jelas. Tagana tidak berwenang menentukan Kapan Tanggap Darurat mulai dilaksanakan, berapa jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti berapa jumlah tenda yang harus dibangun, berapa banyak logistik yang harus dibawa, dan sampai kapan proses Tanggap Darurat itu berakhir.

Walaupun Tagana sudah ikut serta dalam berbagai aktivitas riil (mulai dari pemetaan daerah rawan bencana, simulasi, Tanggap darurat sampai dengan masa rehabilitasi), namun sebagai organisasi, Tagana belum mempunyai program baku yang mandiri secara otonom. Program yang dilaksanakan umumnya masih menginduk pada instansi sektoral yang menaungi, sehingga terkesan tidak ada target yang hendak dicapai dari organisasi. Tagana masih berfungsi sebagai suport terhadap kegiatan instansi sosial.

Kondisi Tagana Kabupaten Malang maupun Blitar untuk melibatkan diri secara sukarela dalam penanganan bencana, baik pra bencana, massa bencana maupun pasca bencana. Secara organisatoris atau sruktur birokrasi bahwa Tagana masih kurang kuat lepas dari organisasi pemerintah daerah dan belum ada dukungan regulasi yang dari daerah. Demikian juga dari sisi sumber daya yaitu terutama pendanaan Tagana masih sangat tergantung pada APBN itupun jumlahnya masih sangat sedikit, tidak mencukupi untuk kebutuhan Tagana, baik untuk kebutuhan organisasi maupun kebutuhan pribadi (upah/honor/ taliasih). Dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Tagana terbatas pada mereka yang mau menjadi anggota dengan secara sukarela, dan sumber daya ekonomi mereka sangat terbatas. Demikian pula minimnya sumberdaya yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki.

Mitra Kerja Tagana

Tagana dalam menjalankan fungsinya pada umumnya membantu beberapa lembaga yang mempunyai Tupoksi dalam penanggulangan bencana alam misalnya TNI, POLRI, SAR, PU, Barisan Pemadam Kebakaran, PMl, dan organisasi yang mepunyai komitmen untuk membantu penanggulanagn bencana alam seperti ORARI, Pencinta Alam, kelompok masyarakat penanggulangan bencana alam, Pramuka, TRC, LSM lokal maupun internasional, karang taruna dan kalangan ulama. Namun demikian Tagana mempunyai mitra yang sifatnya sejajar keberadaannya, di luar birokrasi pemerintahan. Mitra kerja Tagana dalam menangani bencana antara lain TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), KSB, Karang Taruna, PKH (Program Keluarga Harapan), pihak Gereja dan masjid dan lain-lainnya.

Tagana Malang telah bermitra dengan organisasi lainnya dalam membantu korban bencana alam, seperti korban erupsi Gunung Bromo yang terjadi 2011, yang ada di wilayah Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, bekerja sama dengan komunitas Gereja Kristen Indonesia, atas bantuan dari mitra berupa beras sebanyak 3 ton, dan 50 kardus mie instan. Bantuan yang disalurkan tersebut diperuntukkan 567 KK di Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo (data diambil dari berbagai

sumber, 2017). Tagana di Kabupatern Malang pernah bermitra dengan *Church World Service* (CWS) dalam program "Penguatan Kapasitas dan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana". Sedangkan sumber dana dari program penguatan Kapasitas, dan manajemen pengurangan resiko bencana adalah berasal dari *Action by Churches Together Intemational* (ACTI). Selain itu *Church World Service* (CWS) juga mempunyai 3 (tiga) program yaitu memberi (1) pendampingan terhadap anak SDN dan Madrsah lbtidaiyah di Desa Wukirsari (2) pendidikan dan pelatihan sampai ke tingkat dusun mengenai bagaimana cara menghadapi bencana alam seperti pelatihan gladi dan simulasi penanggulangan bencana (3) Membentuk "Forum Pengurangan Resiko Bencana". Salah satu kegiatan dari forum ini adalah melibatkan masyarakat untuk kegiatan mitigasi berupa menanam pohon lamtorogung pada lahan kritis untuk mencegah banjir dan kekeringan.

Tagana Kabupaten Blitar, bermitra dengan masyarakat, LSM yang peduli bencana. Secara rinci sesuai dengan pra bencana sampai pasca bencana dapat dijelaskan sebagaimana berikut: pada saat pra bencana mitra kerja Tagana antara lain adalah relawan KSB, dan sahabat bencana. Kemudian pada massa bencana Tagana bermitra dengan KSB, Sahabat Tagana, pekerja sosial, organisasi masyarakat, PKH, TKSK. Selanjutnya pada massa pasca bencana Tagana bermitra dengan relawan KSB, sahabat Tagana dan pekerja sosial.

Tabel 4. Kemitraan Tagana

Kemitraan Tagana	**Kab. Malang**	**Kab. Blitar**
Kesejajaran	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), KSB (Kampung Siaga Bencana), Karang Taruna, PKH (Program Keluarga Harapan), kelompok masyarakat penangulangan bencana, pecinta alam, LSM	TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), KSB (Kampung Siaga Bencana), Karang Taruna, PKH (Program Keluarga Harapan), Pecinta Alam, LSM
Organisasi Keagamaan	*Church World Service* (CWS) dalam program "Penguatan Kapasitas dan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana, Masjid, Gereja	Masjid, Gereja dalam Pemberian bantuan material
Institusional	Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), TNI, POLRI, SAR, PMl, ORARI, PU.	Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), TNI, POLRI, SAR, PMl, ORARI, PU.

Sumber: Data Primer Diolah

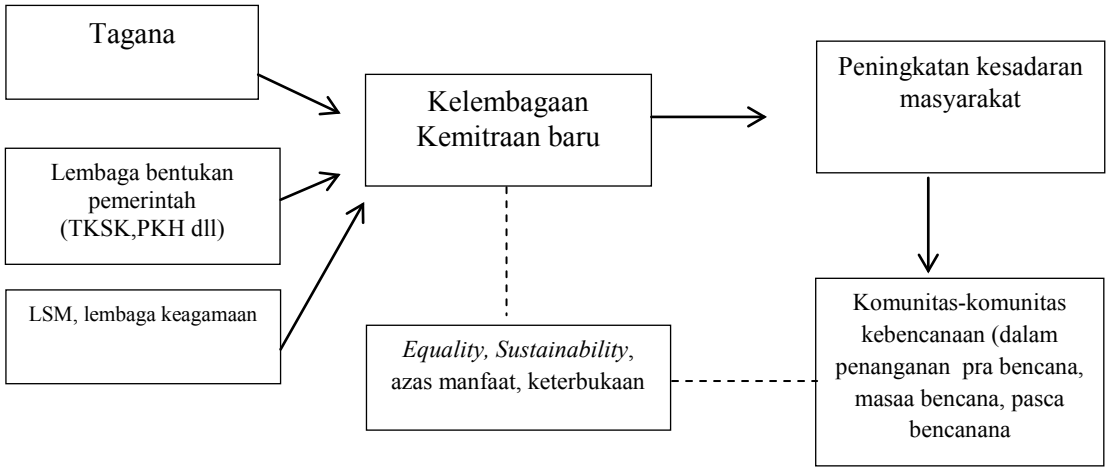

Keterangan: ⟶ arah pembentukan/tujuan
-------> Landasan/dasar kemitraan

Sumber: Data Diolah

Gambar 2. Model Kemitraan

Kondisi kemitraan yang dibangun oleh Tagana, menunjukkan bahwa eksistensi Tagana dalam menangani bencana dibutuhkan oleh masyarakat dan mempunyai fungsi membantu pemerintah untuk menangani bencana bekerjasama dengan pihak lain. Kemitraan yang dibangun oleh Tagana melalui Dinas Sosial berjalan dengan baik. Kemitraan Menurut Notoatmodjo (2003) adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dapat dikatakan bahwa kemitraan yang dibangun oleh Tagana dalam menangani bencana masih efektif. Argumen ini mengadopsi teori Cluster I Bmard (Steers, 1985) efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Dari kondisi kemitraan yang ada dan telah dilakukan oleh Tagana bersama lembaga lainnya, maka perlu dibangun kemitraan yang efektif. Kemitraan yang dibangun hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip *equality*, keterbukaan dan prinsip azas manfaat, keberlanjutan atau *sustainability*. Dengan demikian diharapkan tumbuh lebih banyak KSB diberbagai daerah yang tidak tergantung pada pemerintah.

SIMPULAN

Tagana Kabupaten Malang dan Blitar telah berperan dalam penanganan bencana, baik pada masa pra bencana, masa bencana maupun pasca bencana. Tagana dalam sosialisasi maupun menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat dari sisi kuantitasnya sangat sedikit, kurang efektif, tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di daerah rawan bencana. Sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat berdampak positip, adanya perubahan sikap, peningkatan pengetahuan dan keterampilam dalam menangani bencana, mempunyai keperdulian dalam penanganan bencana, munculnya kesadaran komunitas pentingnya kebersamaan dalam penanganan bencana seperti KSB. Faktor motivasi Tagana dalam penanganan bencana menjadikan modal sosial. Namun dalam penanganan bencana tidak maksimal, adanya hambatan struktural birokrasi bahwa Tagana lepas dari organisasi pemerintah daerah dan belum ada dukungan regulasi dari daerah. SDM, pendanaan sangat

tergantung pada APBN dan jumlahnya masih sangat sedikit, tidak mencukupi untuk kebutuhan organisasi Tagana, maupun kebutuhan pribadi (upah/honor/ taliasih). Dalam implementasi kebijakan disposisi implementor terhadap peran Tagana adalah kurang adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, selama ini dipahami oleh daerah sebagai program dari pemerintah pusat dan dibiayai oleh pusat. Kondisi kemitraan menunjukkan bahwa eksistensi Tagana dalam menangani bencana dibutuhkan oleh masyarakat dan mempunyai fungsi membantu pemerintah untuk menangani bencana. Kemitraan yang dibangun oleh Tagana melalui Dinas Sosial terutama dalam penanganan di masa bencana berjalan dengan efektif. Namun kemitraan yang sejajar antara Tagana dengan lembaga lain seperti lembaga keagamaan masih belum efektif tidak dibangun kearah kimtraan berdasarkan *equality*, keterbukaan, prinsip azas manfaat, dan *sustainability*. Dari kondisi ini direkomendasikan agar ada regulasi daerah untuk memberikan peran yang lebih besar terhadap TAGANA baik dari sisi kapasitas, kapabilitas dan pendanaan dengan prinsip azas kemanfaatan, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosoeprapto, K. (2004). *Sistem Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Gramedia.

Davis, K. (1967). *Human Realation at Work The Dynamics of Organizational Behavior Mc.* Grow Hill Book Company.

Departemen Sosial. (2006). *Taruna Siaga Bencana (Youth Disaster Preparedness Unit), sebagai gugus Tugas Penanggulangan Bencana Berbasis Kcmunitas.* Jakarta: Departemen Sosial

Dwijowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Cetakan Kedua. PT. Elex Media Komputindo.

Tadjudin, E. N. (2000). *Pembangunan, Krisis, dan Arah Reformasi,* Muhammadiyah Univercity Press.

Jenkins Smith, H. C. (1990). *Demokratic Politics and Policy Analysi.* Pacific Grove:Brooks and Cole Publishing Company.

Kodoatie, Robert J. & Sjarief, Roestam. (2006). *Pengelolaan Bencana Terpadu (Banjir, Kongsor, Kekeringan dan Tsunami.* Yarsif Watampone

Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP-AMP YKPN.

Mathis, R., Jackson, J. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba empat.

Mattew, B., Miles, A., Hubberman, M., and Saldana, J (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition).* Sage Publications.

Notoatmodjo, S. (2007). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Permensos No 28 Tahun 2012 tentang pedoman umum Taruna Siaga Bencana.

Permensos No. 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga.

Permensoss 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana.

Ramesh., & Howlett. (1995). *Faktor Internal Maupun Eksternal Implementasi Kebijakan. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Aksara Baru.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.

Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana.

Sutrisno, L. (1987). Metodologi untuk Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan. *Prosiding Seminar Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan PAUUGM, 910 Maret 1987*. Yogyakarta.

Undang-Unadang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Cetakan Pertama. Media Pressindo.

Lampiran 1. Faktor Pendorong & Penghambat Tagana dalam Menjalankan Perannya

Faktor Pendorong	**Kab. Malang**	**Kab. Blitar**	**Keterangan**
	Motivasi anggota Tagana yang kuat terhadap kemanusiaan	Punya Motivasi yang tinggi	Jumlah Tagana Kabupaten Malang sebanyak 100 orang, sedangkan Tagana Kabupaten Blitar berjumlah 43 orang.
	Komitmen para anggota Tagana	Komitmen para anggota membantu masyarakat terkena bencana	
	Dorongan pimpinan Tagana baik.	Dorongan pengurus/ pimpinan Tagana yang baik	
	Keeratan anggota Tagana yang saling mendukung, menguatkan diantara mereka	Keeratan anggota Tagana, saling mendukung dan menguatkan diantara anggota Tagana	
Faktor penghambat	Kab. Malang	Kab. Blitar	Keterangan
SDM Tagana,	Koordinator Tagana merangkap kerja dibirokrasi , pendidikan rata-rata SMA/SMK. Pekerjaan formal para anggota/ pengurus Tagana tidak menetap, banyak yang ikut sebagai organisasi masyarakat bentukan pemerintah , maupun mempunyai pekerjaan lainnya seperti petani, tenaga srabutan	Koordinator Tagana merangkap kerja di birokrasi. Pendidikan rata-rata SMA/SMK. Pekerjaan formal para anggota Tagana tidak menetap, banyak yang ikut sebagai organisasi masyarakat bentukan pemerintah, dan punya pekerjaan lainnya	Koordinator Tagana Malang berasal dari tenaga honorer di sekretariat Pemerintah Daerah. Demikian juga Koordinator Tagana di Kabupaten Blitar bekerja sebagai PNS. Para anggota/Pengurus Tagana ikut organisasi yang ganda seperti TKSK, PKH, karang Taruna, kelompok penyelamat pantai pengurus LSM pegiat anti korupsi, srabutan, petani
Sarana dan prasarana Tagana,	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Tagana masih kurang. Tagana memiliki Sarana berupa: sepeda motor tril sebanyak 2 buah, mobil ranger merek Mitsubhisi strada sebanyak 1 (satu) buah, truk evakuasi 1 (satu) buah, Truk DU (dapur umum) sebanyak 1 (satu) buah.	Sarana dan prasarana masih kurang: 1 buah mobil strada RTU (Rescue Tactical Unit), 1 buah truk dapur umum lapangan (Dumlap), 1 buah sepeda motor trail, beberapa tenda pengungsi, keluarga dan dapur umum, 1 buah perahu dolpin, perlengkapan dapur umum, alat komunikasi HT	Sarama dan parsana tersebut yang membelikan Kementerian Sosial RI APBN), bukan APBD

Faktor Pendorong	Kab. Malang	Kab. Blitar	Keterangan
Pendanaan & Insentif	Pemberian taliasih tidak memadahi. Pada awalnya, insentif berupa taliasih yang diberikan sebesar Rp.50.000,/bulan mulai tahun anggaran 2009 bertambah menjadi Rp.100.000/ bulan. Kemudian tahun 2010 naik Rp.100.000;/ bulan. Sekarang ini baru tali asih naik menjadi Rp 350.000; yang rinciannya Rp 250.000; dari pemerintah pusat dan Rp 100.000; dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Kegiatan kebencanaan dimulai tahun 2015 hingga 2017 mendapatkan dana pengerahan dari Dinas Sosial Kabupaten sebesar Rp 30 juta/th, diberikan pertermin.	Pemberian taliasih tidak memadahi. Pada awalnya, insentif berupa taliasih yang diberikan sebesar Rp.50.000,/bulan mulai tahun anggaran 2009 bertambah menjadi Rp.100.000/bulan. Kemudian mulai tahun 2010 naik Rp.100.000;/ bulan . sekarang ini baru tali asih naik menjadi Rp 350.000; yang rinciannya Rp 250.000; dari pemerintah pusat dan Rp 100.000; dari pemerintah provinsi Jawa Timur.	Pemberian Taliasih dari APBN (Pusat) dan APBD Provinnsi. Pemberian honor terbentu pada Permensos No. 29/2012 dan No. 29/2012 disebutkan Tagana organisasi relawan.
Regulasi & Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah	Tidak adanya regulasi daerah yang mengatur Tagana. Posisi Tagana dipersepsikan milik pemerintah (pusat). SK Tagana di Keluarkan oleh Kepala Dinas Sosial. Penyusunan organiasi tergantung dari daerah.	Tidak adanya regulasi daerah yang mengatur Tagana. Posisi Tagana dipersepsikan milik pemerintah (pusat). SK Tagana di Keluarkan oleh Kepala Dinas Sosial. Penyusunan organiasi tergantung dari daerah	Permensos No. 28 Tahun 2012 dan Permensos No. 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga disebutkan organisasi relawan.
Progam Kerja	Tagana tidak mempunyai program kerja. Baru periode kepengurusan 2017-2019 mencoba menyusun program kerja, namun tetap menginduk kegiatan pada Dinas Sosial	Tidak mempunyai program kerja hingga sampai sekarang, kegiatan tetap menginduk pada dinas sosial setempat sebagai instansi pembinanya.	Tidak ada kemandirian Tagana. Keberadaannya sangat tergantung kepada pemerintah (pusat dan daerah).